

ABSTRAK

Akibat kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan sebagai korban *revenge porn* semakin meningkat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) hanya memberi jeratan hukum terhadap pelaku saja dan di dalam Putusan Pengadilan juga tidak memuat serta mengatur mengenai hak dan pemulihan korban. Oleh sebab itu rumusan masalahnya adalah apakah putusan pengadilan yang ada telah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan pornografi non-konsepsual (*revenge porn*)?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, penelitian ini berupaya menilai konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum terkait ketidaksetaraan gender untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan pengadilan belum memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan . Hal tersebut terjadi akibat tidak adanya aturan khusus mengenai kejahatan *revenge porn*. Dalam Putusan Pengadilan dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memuat mengenai pemberian sanksi dan penjeratan kepada pelaku saja, tidak ada muatan yang memberikan perhatian khusus kepada perempuan korban *revenge porn*. Perlunya pembaharuan kebijakan hukum dengan menerapkan langkah-langkah penting yang memberi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dengan memperhatikan kondisi dan situasi korban akibat kejahatan yang dihadapinya. Dengan begitu maka keadilan akan tercapai dengan sebagaimana mestinya ketika pembaharuan aturan tersebut menerapkan serta memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan sebagai korban.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Perlindungan Hukum, Perempuan Sebagai Korban, Pornografi non-konsepsual

ABSTRACT

As a result of growing technological advances and the absence of adequate legal protection for women as victims, revenge porn is increasing. In Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions Article 27 paragraph 1 only provides legal liability for the perpetrator. The Court Decision also does not contain and regulate the rights and remedies for victims. Therefore, the formulation of the problem is whether existing court decisions have provided legal protection for women victims of non-consensual pornography crimes (*revenge porn*)

The research method used is normative juridical research. The problem approach in this research uses a statutory approach and a case approach. Analyzing legal materials using the deductive method, this research seeks to assess consistency and fairness in the application of law related to gender inequality to answer the problems studied.

The results of this study show that there is still gender inequality faced by women victims of revenge porn. This occurs due to the absence of specific rules regarding the crime of revenge porn. Court decisions and the Law on Information and Electronic Transactions only contain sanctions and incarceration for the perpetrators, no content gives special attention to women victims of revenge porn. There is a need for legal policy reform by implementing important steps that provide legal protection to women as victims by paying attention to the conditions and situation of victims due to the crimes they face. That way, justice will be achieved properly when the reform of the regulation applies and pays attention to the interests of women as victims.

Keywords: Court Decision, Legal Protection, Women as Victims, Non-conceptual Pornography